

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DI KAMPUNG TANJUNG
REJO KECAMATAN NEGERI AGUNG
KABUPATEN WAY KANAN**

(Skripsi)

Oleh

**MADE YUNIA REDIANA
NPM. 1916041012**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DI KAMPUNG TANJUNG REJO, KECAMATAN NEGERI AGUNG, KABUPATEN WAY KANAN

Oleh

MADE YUNIA REDIANA

Pemerintah merupakan penggerak pembangunan negara mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan. Namun, pelayanan sering digambarkan sebagai proses yang berbelit-belit, tidak efektif dan efisien sehingga diperlukan perubahan dari tingkat bawah pemerintahan yaitu dari desa atau kampung. Kemudian munculah konsep *smart village* yang mengacu pada peningkatan pelayanan berbasis digital dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat sehingga terwujudnya pelayanan prima. Kampung Tanjung Rejo yang berada di Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu Kampung yang menerapkan program *smart village*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menggunakan model implementasi George Edward III meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, menunjukkan bahwa program *smart village* dalam peningkatan kualitas sumberdaya aparatur kampung dalam memberikan pelayanan berbasis digital sudah cukup baik. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi kendala seperti sumberdaya yang belum optimal, anggaran yang terbatas serta belum adanya SOP terkait dengan pelaksanaan program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo.

Kata kunci: Pelayanan, *smart village*, implementasi, Kampung Tanjung Rejo

ABSTRACT

SMART VILLAGE PROGRAM IMPLEMENTATION IN TANJUNG REJO VILLAGE, NEGERI AGUNG DISTRICT, WAY KANAN REGENCY

By

MADE YUNIA REDIANA

The government is the driver of state development and has an obligation to carry out its duties and functions to meet the needs of the community in terms of services. However, services are often described as convoluted, ineffective and inefficient processes, so changes are needed from the lower levels of government, namely from the village or village. Then the smart village concept emerged, which refers to improving digital-based services with the aim of increasing community empowerment and involvement so that excellent service can be achieved. Tanjung Rejo Village, which is in Negeri Agung District, Way Kanan Regency, is one of the villages that implements the smart village program. This research uses a descriptive qualitative method with data collection methods through interviews, observation and documentation. The results of research using George Edward III's implementation model including Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure, show that the smart village program in improving the quality of village apparatus resources in providing digital-based services is quite good. However, there are several things that are obstacles, such as resources that are not optimal, limited budget and the absence of SOPs related to implementing the smart village program in Tanjung Rejo Village.

Keywords: *Services, smart village, implementation, Tanjung Rejo Village*

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DI KAMPUNG TANJUNG
REJO KECAMATAN NEGERI AGUNG
KABUPATEN WAY KANAN**

Oleh

MADE YUNIA REDIANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM SMART
VILLAGE DI KAMPUNG TANJUNG REJO
KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN
WAY KANAN**

Nama Mahasiswa : **Made Yinia Rediana**

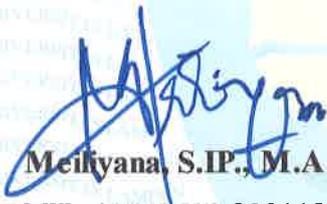
No Pokok Mahasiswa : **1916041012**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Meiliyana, S.IP., M.A

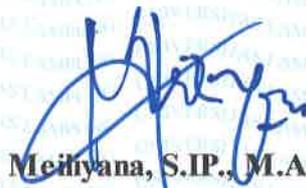
NIP. 19740520 200112 2 002



Nana Mulyana, S.IP., M.Si

NIP. 19710615 200501 1003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Meiliyana, S.IP., M.A

NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Meiliyana, S.IP., M.A

Sekretaris : Nana Mulyana, S.IP., M.Si

Penguji : Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra, Ida Nurhaida, M.Si

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 November 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 16 November 2023
Yang membuat pernyataan,



Made Yunia Rediana
NPM 1916041012

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Made Yunia Rediana, lahir di Way Kanan 18 Juni 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ketut Biase dan ibu Nyoman Sunarti. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari TK Dharma Bhakti pada tahun 2006-2007, dilanjutkan di SDN 01 Mulya Sari pada 2007-2013. Setelah lulus, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Negeri Agung pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Kotabumi pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis cukup aktif dalam mengikuti organisasi tingkat Universitas, jurusan maupun diluar universitas yakni, BEM Unila, UKMH Unila, HIMAGARA dan KMHDI Lampung. Pada bulan Desember 2021 hingga januari 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Tawar Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya pada bulan Maret hingga Agustus 2022 penulis mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

“Sekecil apapun kebaikan, kebaikan tetaplah kebaikan. Sekecil apapun dosa, dosa tetaplah dosa. Semua ada balasannya, Kau tidak bisa menghindari hasil dari perbuatan mu sendiri”

-Sri Krisna-

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

-Ridwan Kamil-

“Jangan bersaing tentang apapun dengan siapapun, Kamu akan lelah dan kehilangan jati diri, Tapi bersainglah dengan dirimu yang kemarin dan berusahalah besok kamu lebih baik dan terus menjadi baik dalam segala hal”

-Nia-

PERSEMBAHAN

Om Awignam Astu Namō Sidham Om Sidhirastu Tad Astu Swaha
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
Penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Ayahku (Ketut Biase) dan Ibuku (Nyoman Sunarti),

Pahlawan yang senantiasa selalu mendoakan, selalu mendukungku, memberikan semangat dan memberikan masukan atas apa yang aku raih dalam kehidupan ini.

Saudari ku tersayang,

Kakak perempuanku (Wayan Cita Noverida) dan adik perempuanku (Komang Rara Pramudya Sukma) yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta selalu membantu menyelesaikan masalah apapun yang aku hadapi.

Sahabat-sahabatku,

Yang selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi serta memberikan banyak pengalaman dan kenangan.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta dukungan dan doa.

Almamater Tercinta,
UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Astungkara, puji dan syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program *Smart Village* Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa selama ini telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan ibu, terima kasih banyak atas doa yang selalu dipanjatkan, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang begitu besar untuk saya agar bisa mengampu pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perkuliahan. Astungkare saya bisa menyelesaikan perkuliahan. Saya sangat bersyukur dan bangga terlahir menjadi anak dari orang tua yang sangat luar biasa.
2. Ibu Meilyana, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing utama sekaligus pembimbing akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, serta memberikan motivasi dan dukungan untuk tidak berputus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah ibu selalu dilancarkan.
3. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing kedua Terimakasih bapak untuk segala bimbingan, saran, masukan dan semangat yang bapak berikan kepada saya untuk memperbaiki skripsi saya. Segala

masukan yang bapak berikan menjadi wawasan dan pelajaran untuk saya, semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan.

4. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu juga memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam proses skripsi ini. Semoga ibu selalu diberi kelancaran dalam segala urusan.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih untuk seluruh dedikasi yang diberikan dalam mengajar para mahasiswa. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup ke depannya bagi saya dan mahasiswa lainnya.
8. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih untuk selalu membantu mengurus berbagai administrasi dari mulai saya menjadi mahasiswa baru hingga lulus.
9. Seluruh aparat Kampung Tanjung Rejo dan informan, terima kasih sudah membantu penulis dalam memperoleh data untuk penyusunan skripsi hingga selesai, semoga bapak/ibu selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan.
10. Kakak dan adiku tersayang, terima kasih selalu mendukung dan menyemangati saya. Mari kita bersama-sama membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita.
11. Seluruh keluarga besar, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kasih sayang, mendoakan dan mendukung saya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu.
12. Teman-temanku tersayang, Mba Kadek, Sayu dan Riska. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan selalu memberikan semangat serta dorongan kepada saya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu.

13. Teman-teman seperjuangan, Laila, Putri, Indri, Marfu, Fentika, Sherly dan Sinta. Terima kasih atas semangat dan dukungannya selama masa perkuliahan ini.
14. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Made Yunia Rediana atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri karena bisa bertahan sampai akhir. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mri bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi penulis berharap kiranya karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua.

Bandar Lampung, 13 November 2023

Penulis,

Made Yunia Rediana

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| 2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik..... | 11 |
| 2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik..... | 11 |
| 2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan..... | 12 |
| 2.2.3 Model Implementasi Kebijakan..... | 15 |
| 2.3 Pelayanan Publik..... | 22 |
| 2.4 Tinjauan Tentang Program <i>Smart Village</i> | 24 |
| 2.4.1 Konsep <i>Smart Village</i> | 24 |
| 2.4.2 Variabel <i>Smart Village</i> | 25 |
| 2.5 Kerangka Pikir Penelitian..... | 29 |
| III. METODE PENELITIAN | 30 |
| 3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian..... | 30 |
| 3.2 Fokus Penelitian..... | 31 |
| 3.3 Lokasi Penelitian..... | 32 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian..... | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 35 |
| 3.7 Teknik Keabsahan Data..... | 37 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 39 |
| 4.1.1 Profil Kampung | 39 |
| 4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kampung Tanjung Rejo..... | 40 |
| 4.1.3 Visi dan Misi Kampung Tanjung Rejo..... | 46 |
| 4.1.4 Struktur Organisasi..... | 47 |
| 4.2 Hasil Penelitian..... | 47 |
| 4.2.1 Implementasi Program <i>Smart Village</i> Di Kampung Tanjung Rejo | 48 |
| 1. Komunikasi..... | 51 |
| 2. Sumberdaya..... | 58 |
| 3. Disposisi..... | 68 |
| 4. Struktur Birokrasi..... | 71 |
| 4.3 Pembahasan..... | 73 |
| 1. Komunikasi | 75 |
| 2. Sumberdaya..... | 78 |
| 3. Disposisi..... | 82 |
| 4. Struktur Birokrasi..... | 84 |
| V. KESIMPULAN DAN SARAN | 87 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 87 |
| 5.2 Saran..... | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 89 |
| LAMPIRAN | 92 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 1 Penelitian Terdahulu | 8 |
| Tabel 2 Informan Penelitian | 34 |
| Tabel 3 Dokumentasi | 35 |
| Tabel 4 Jumlah Sumberdaya Manusia dan Jenjang Pendidikan Akhir | 61 |
| Tabel 5 Daftar fasilitas, sarana dan prasarana di Kampung Tanjung Rejo | 66 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian | 29 |
| Gambar 2 Profil Kampung Tanjung Rejo | 39 |
| Gambar 3 Struktur Organisasi Kantor Kampung Tanjung Rejo | 47 |
| Gambar 4 Tampilan laman utama website Kampung Tanjung Rejo | 48 |
| Gambar 5 Arus Komunikasi | 54 |
| Gambar 6 Sosialisasi, pembinaan dan bimtek Tim Official program <i>smart village</i> Provinsi Lampung | 54 |
| Gambar 7 Laman Menu Website Kampung Tanjung Rejo | 65 |
| Gambar 8 Ruang Pelayanan Kampung Tanjung Rejo..... | 67 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia telah memberikan perubahan yang cukup besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pemerintah sebagai penggerak pembangunan negara dalam merespon masuknya era revolusi industri 4.0 dituntut untuk menerapkan teknologi informasi di berbagai tata kelola pemerintahan. Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan inovasi-inovasi baru yang tentunya mendukung kesejahteraan kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya era revolusi telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, kesehatan dan budaya, serta teknologi dan media. Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah sebagai pihak penyelenggara pemerintahan memiliki tanggungjawab penuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Saidah et al., 2022).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang desa tersebut menjelaskan bahwa pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa

yang dimaksud disini terdiri dari empat bidang pembangunan yaitu pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat desa. Sesuai dengan hakikat undang-undang desa yaitu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa agar tidak hanya dijadikan sebagai tempat pembangunan, tetapi lebih mandiri baik sebagai tempat maupun sebagai tempat pembangunan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan cara dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sikap, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kesadaran dan pemanfaatan sumber daya, merancang kebijakan, program, kegiatan dan bantuan yang menjawab permasalahan dan kebutuhan mendesak masyarakat desa. Setiap desa harus meningkatkan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Provinsi Lampung adalah salah satu daerah yang menerapkan berbagai inovasi-inovasi program kebijakan dengan memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah negara, pemerintah kota dan desa. Konsep *smart village* sebagai salah satu janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang berfokus pada peningkatan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa, memfasilitasi digitalisasi administrasi desa dan *e-participation* serta melibatkan masyarakat hingga pelosok perdesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi *online* atau aplikasi. Maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung 2020-2024 dengan menimbang, sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu penataan pelayanan desa yang terarah, terpadu dan terprogram guna mewujudkan desa yang mandiri, maju dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Lampung.

2. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelaksanaan *Smart Village* di Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan pertimbangan dimaksud pada nomor 1 dan 2, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

Program *smart village* adalah sebuah pengembangan dari program *smart city*, akan tetapi *smart city* hanya untuk perkotaan dan *smart village* untuk pedesaan. Pembangunan desa berbasis *smart village* adalah sebuah program kebijakan yang baru diterapkan di Provinsi Lampung. Program *smart village* merupakan sebuah wadah dalam pemanfaatan dan inovasi terhadap suatu potensi yang ada di desa untuk mengembangkan dan memajukan desa seperti meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan pelayanan berbasis digital seperti pelayanan administrasi desa, pendataan masyarakat miskin penerima bantuan, pendataan warga yang sudah vaksin, publikasi anggaran dan lain sebagainya (Maulana, 2022).

Terdapat 3 (tiga) elemen pokok *smart village* yaitu *smart government* atau pemerintah cerdas, *smart community* atau masyarakat cerdas dan *smart environment* atau lingkungan cerdas. Ketiga elemen tersebut menjadi dasar dalam mencapai tujuan pengembangan program *smart village*. Dengan begitu, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam hal pelayanan administrasi. Keinginan masyarakat yang beragam dan berbagai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan harus direalisasikan menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. *Smart village* sangat diperlukan agar desa-

desa mampu mengetahui permasalahan yang ada didalamnya dan memahami kondisi permasalahan yang ada (Herdiana, 2019).

Berdasarkan hasil pra riset yang telah peneliti lakukan bahwa sebelum adanya program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo, kondisi fisik desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Lokasi Kampung Tanjung Rejo yang terletak jauh dari pemerintahan kabupaten kota sekitar \pm 20 km. Permasalahan penyelenggaraan pelayanan yang sering terjadi yaitu pelayanan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama, kurang responsive, prosedur yang tidak jelas, berbelit-belit dan terkadang pihak pemerintah kampung juga memungut biaya agar mempermudah pelayanan. Selanjutnya, tingkat kapasitas sumber daya manusia pemerintah kampung yang masih rendah serta belum memiliki BUMDES dan UMKM Kampung sehingga tidak ada pendapatan yang masuk ke dalam kas Kampung.

Pada awalnya Kampung Tanjung Rejo terpilih menjadi salah satu perwakilan Kabupaten Way Kanan dalam lomba kampung tingkat Provinsi Lampung pada tahun 2019. Lomba kampung adalah langkah komprehensif yang terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan, dalam melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap pemerintah kampung. Dengan ditetapkannya Kampung Tanjung Rejo sebagai juara satu Lomba Kampung tingkat Provinsi Lampung, dan adanya salah satu program unggulan yaitu digitalisasi administrasi dan pelayanan di kampung. Harapannya dalam partisipasi Kampung Tanjung Rejo ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan kemudian dapat dijadikan percontohan bagi kampung-kampung lain khususnya di Kabupaten Way Kanan.

Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/71/V.12/HK/2021 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2021 salah satunya yaitu Kampung Tanjung Rejo. Program *smart village* diharapkan dapat memberikan *mind set* baru

bagi masyarakat kampung dan perangkat kampung. Sebagai desa *pilot project* yang dijadikan untuk tempat *launching* program, Kampung Tanjung Rejo banyak melakukan perubahan baik perubahan fisik, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung. Hal tersebut dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo. Bentuk implementasi program *smart village* berbasis digital yang telah dilakukan yaitu sistem pelayanan berbasis digital dengan menggunakan website kampung yang merupakan situs online dalam mempermudah pelayanan publik serta mempermudah masyarakat memperoleh berbagai informasi mengenai kampung.

Pemerintah Kampung Tanjung Rejo bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Way Kanan mengadakan program Pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). Program ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan BPS dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi diseluruh kementerian atau lembaga di Indonesia dalam menunjang program *smart village*. Terwujudnya desa cantik sangat bermanfaat bagi pemutakhiran data yang dimiliki desa, jika data mutakhir maka arah pembangunan desa akan tepat sasaran. Pemuktahiran data yang telah dilakukan yaitu pemuktahiran data dasar keluarga pada tahun 2021. Keluaran dari program ini berupa inovasi data yang akan ditampilkan hingga ke tingkat desa, desa dalam angka, publikasi digital desa, pojok statistik desa, monografi desa, peta desa dan kemudian diintegrasikan di website desa dan diintegrasikan dengan satu portal data.

Program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo sudah berjalan dengan baik namun masih belum optimal. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Angga selaku penanggungjawab program di Kampung Tanjung Rejo bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya sumberdaya manusia baik dari aparat kampung maupun masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana serta

kurangnya pendampingan oleh pemerintah kabupaten seperti pendampingan dari tenaga profesional yang memahami tentang program *smart village*.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan Program *Smart Village* disana dengan judul **“Implementasi Program *Smart Village* di Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program *Smart Village* di Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi Program *Smart Village* di Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan peneliti, dan menambah penelitian atau kajian bagi perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini memberikan informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti aparat kampung, pemerintah kabupaten, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat yang terkait dalam pelaksanaan program *Smart Village* di Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Hasil |
|---|---|--|
| Pengembangan Konsep <i>Smart Village</i> bagi Desa-Desa di Indonesia (Dian Herdiana, 2019) | Fokus dalam pengembangan konsep <i>smart village</i> bagi desa-desa di Indonesia dengan menggunakan tiga elemen pokok <i>smart village</i> yaitu <i>smart government</i> , <i>smart community</i> dan <i>smart environment</i> . | Hasil penelitian ini dilihat dari ketiga faktor tersebut menjadi dasar tercapainya tujuan pembangunan desa cerdas berupa hubungan cerdas, khususnya hubungan konstruktif yang bersumber dari hubungan 3 unsur desa cerdas. Oleh karena itu, sinergi berbasis pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. |
| Penerapan Model <i>Smart Village</i> dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang (Tia | Berfokus untuk melihat analisis peluang dan tantangan <i>smart village</i> pada pengembangan desa wisata dari sisi <i>smart people</i> , <i>smart government</i> , <i>smart economy</i> , <i>smart environmental</i> dan <i>smart promotion</i> . | Hasil penelitian ini berupa upaya penerapan <i>smart village</i> dalam pengembangan desa wisata, peluang dan tantangan dalam penerapannya, serta rekomendasi kepada <i>stakeholder</i> terkait. Upaya dalam penerapan <i>smart village</i> pada pengembangan desa wisata masih belum dilakukan secara optimal baik dari masyarakat |

| | | |
|---|--|--|
| Subekti dan Ratnaningsih Damayanti, 2019) | | maupun pemerintah. Hal tersebut terlihat karena minimnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi. |
| Desa Di Era Digital (Studi Kasus Tentang Inovasi Desa Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas) Ali Rokhman (2020) | Fokus penelitian ini yaitu berfokus pada bagaimana proses lahirnya inovasi di Desa Dermaji khususnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan teori inovasi pelayanan publik. | Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan yang ditentukan oleh undang-undang bagi setiap warga negara, atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh badan penyelenggara pelayanan. (UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Keperluan Umum). Ketidakmampuan desa untuk memberikan layanan online secara langsung bukan karena hambatan teknologi melainkan karena keterbatasan kewenangan perangkat desa. Pemerintah desa hanya perlu membuat surat rekomendasi kepada atasan, kecamatan dan kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa desa tidak memiliki otonomi dalam pelayanan publik. |

Sumber : Diolah peneliti 2023

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan implementasi program *smart village* seperti penelitian Herdiana (2019) tentang pengembangan konsep *smart village* bagi desa-desa di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat hasil penelitian ini terdapat 3 (tiga) elemen pokok *smart village*, yakni *smart government*, *smart community* dan *smart environment* yang menjadi dasar dalam mencapai tujuan. Ketiga faktor tersebut menjadi dasar tercapainya tujuan pembangunan desa cerdas berupa hubungan cerdas, khususnya hubungan konstruktif yang bersumber dari hubungan 3 unsur desa cerdas. Oleh karena itu, sinergi berbasis pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian selanjutnya yang terkait yaitu penelitian tentang penerapan model *smart village* dalam pengembangan desa wisata (Tia Subekti dan Ratnaningsih Damayanti, 2019) dengan hasil penelitian ini berupa upaya penerapan *smart village* dalam pengembangan desa wisata, peluang dan tantangan dalam penerapannya, serta rekomendasi kepada *stakeholder* terkait. Upaya dalam penerapan *smart village* pada pengembangan desa wisata masih belum dilakukan secara optimal baik dari masyarakat maupun pemerintah. Hal tersebut terlihat karena minimnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi.

Penelitian lain menurut Ali Rokhman (2020) hasil dari penelitian ini berupa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan yang ditentukan oleh undang-undang bagi setiap warga negara, atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh badan penyelenggara pelayanan. (UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Keperluan Umum). Ketidakmampuan desa untuk memberikan layanan online secara langsung bukan karena hambatan teknologi melainkan karena keterbatasan kewenangan perangkat desa. Pemerintah desa hanya perlu membuat surat rekomendasi kepada atasan, kecamatan dan kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa desa tidak memiliki otonomi dalam pelayanan publik.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas dengan penelitian penulis sekarang tentu memiliki persamaan dan perbedaan, adapun yang menjadi persamaan adalah ingin menganalisis program *smart village*, sedangkan yang menjadi perbedaan pada fokus dan lokus penelitian sehingga tidak menjamin persamaan dari hasil penelitian. Urgensi terkait penelitian tentang program *smart village* ini adalah sebelum adanya program *smart village* ini pelayanan administratif masih dilakukan secara manual, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya sumber daya manusia aparat yang berkualitas. Sesuai dengan peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Program *Smart Village* Provinsi Lampung. Implementasi program *smart village* ini belum berjalan dengan maksimal dan masih terdapat beberapa permasalahan yang ada. Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti mengambil penelitian terkait program *smart village* dimana peneliti ingin melihat bagaimana implementasi program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo.

2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan setiap keputusan khususnya dari pemerintah yang memberikan pengaruh kepada kehidupan bersama. Kebijakan publik memiliki arti sebagai pemecahan masalah dalam kehidupan bersama hari ini dan di masa yang akan datang. Kebijakan publik mengatur segala sesuatu dimana lembaga administrasi publik memiliki wewenang kebijakan publik dalam mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat. Kebijakan publik merupakan kebijakan untuk publik yaitu kehidupan bersama, masyarakat, atau siapapun yang menjadi objek dari sebuah kebijakan (Nugroho, 2021).

Menurut William N. Dunn dalam Pasolong (2013:39), Kebijakan merupakan sebuah rangkaian pilihan saling berhubungan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan atau lembaga pada bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintahan seperti kesehatan, energi, pendidikan, pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat, perkotaan, kriminalitas dan lain-lain. Menurut James E. Anderson yang dikutip Leo Agustino (2014:7) kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau kelompok aktor yang berkaitan dengan sebuah permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu dalam mengatasi permasalahan publik atau untuk kepentingan publik. Dalam implementasi kebijakan biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga mempunyai sifat yang mengikat dan memaksa.

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting. Kebijakan yang dibuat hanya akan menambah masalah baru dalam masyarakat apabila tidak berhasil dilaksanakan. Maka dari itu, implementasi kebijakan publik perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dilaksanakan benar-benar berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi kebijakan publik tidak hanya mencakup operasionalisasi kebijakan publik ke dalam mekanisme birokratis saja akan

tetapi berkaitan dengan bagaimana kebijakan publik tersebut bisa diterima, dipahami dan didukung oleh kelompok sasaran. Implementasi kebijakan juga perlu memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang memiliki pengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat, sehingga kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi merupakan sebuah kegiatan dalam mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilaksanakan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai suatu cara dalam mencapai tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan ada ketika keluaran kebijakan dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga mampu mewujudkan hasil kebijakan, implementasi terdiri dari banyak macam kegiatan, badan-badan ditugasi oleh undang-undang dengan tanggungjawab melaksanakan program dengan berbagai sumber yang diperlukan agar implementasi berjalan lancar.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Akib (2010), berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara kelompok maupun individu dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan tidak hanya berhubungan dengan mekanisme dari penjabaran keputusan politik akan tetapi implementasi erat kaitannya dengan konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan publik adalah sebuah kegiatan yang bersifat interaktif tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan mempunyai kesamaan makna yaitu bahwa implementasi kebijakan publik selalu berada dalam lingkup organisasi dan tidak berada pada ruang yang vacuum, mempunyai sumber daya seperti pelaksana kebijakan tugas dan fungsi, komunikasi, hubungan hirarki dan anggaran dana.

Pendapat selanjutnya menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Tresiana dan Noverman (2019), berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan pemahaman mengenai sebuah program yang menjadi fokus perhatian pemerintah yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Menurut Prof.H.Tachjan dalam Tresiana dan Noverman (2019), mendefinisikan implementasi sebagai proses kegiatan administrasi yang dilaksanakan sesudah kebijakan ditetapkan dan disetujui oleh semua pihak. Kemudian, menurut Dunn dalam Tjilen (2019), berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan aktivitas dalam melakukan kebijakan, yang berisi implementasi program dan sering terdapat berbagai permasalahan yang cukup kompleks serta membutuhkan sebuah tindakan untuk mengatasinya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta setelah kebijakan disepakati dan ditetapkan.

Alasan implementasi kebijakan sangat diperlukan karena mengacu pada pandangan para ahli dimana setiap kebijakan yang sudah dibuat harus diimplementasikan. Maka dari itu, implementasi kebijakan sangat diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan setelah adanya perencanaan suatu program dalam mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga merupakan proses penerapan dari sebuah program yang sudah disusun sebelumnya dan selanjutnya dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi dilaksanakan setelah adanya kebijakan. Menurut peneliti implementasi kebijakan publik yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi yang terdiri dari para pelaksana kebijakan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan kebijakan.

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan sebuah model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan sebuah gambaran kepada kita secara lengkap mengenai suatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang ada pada objek, situasi atau proses tersebut. Bagaimana keterkaitan antara komponen-komponen itu satu dengan lainnya. Model implementasi kebijakan tidak hanya satu, ada berbagai macam model implementasi kebijakan sesuai dengan kerangka berfikir pembuat model tersebut. Dalam uraian berikut ini terdapat beberapa macam model yang akan dibahas, tetapi hanya beberapa saja yang dianggap cukup penting untuk diperkenalkan.

Terdapat beberapa model implementasi menurut para ahli yaitu:

a. Menurut Merilee S. Grindel

Menurut Grindle dalam Agustino (2014), berpendapat bahwa menilai sebuah kebijakan tentang berhasil atau tidaknya ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*.

Content of policy meliputi:

- 1) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), yaitu berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa sebuah kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa perubahan terhadap implementasi.
- 2) *Type of benefits* (tipe manfaat), menurut pola ini dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan adanya dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.

- 3) *Extent of change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), menurut pola ini setiap kebijakan memiliki target yang akan dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada pola ini yaitu seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.
- 4) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan) yaitu pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada pengambilan keputusan harus dijelaskan letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- 5) Program *Implementer* (pelaksana program), yakni dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
- 6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan), yakni pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas dan mendukung agar pelaksanaan berjalan dengan baik.

Context of policy meliputi:

- 1) *Power, interest, and straregy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat), yakni dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan antara kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang akan digunakan para aktor yang terkait dalam memperlancar jalannya suatu implementasi kebijakan.
- 2) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), yakni lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya,

maka pada bagian ini ingin menjelaskan mengenai karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- 3) *Compliance on responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana), pada poin ini akan menjelaskan mengenai sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

b. Menurut Van Meter dan Van Horn

Model ini adalah model klasik, yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan terlaksana secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Model proses implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak ditujukan dalam mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, namun lebih kepada mengukur dan menjelaskan tentang tercapainya program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi akan gagal memperoleh dampak substansial yang sesuai karena kebijakan tidak tersusun dengan benar atau karena keadaan lainnya.

Model implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variable yang mempengaruhi yaitu:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat dinilai tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang terdapat di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka cukup sulit merealisasikan kebijakan hingga dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber Daya

Keberhasilan proses dari implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang sangat penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Akan tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu dipertimbangkan yaitu sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

3) Karakteristik Agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja dari implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan agen pelaksana. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan, semakin luas cakupan implementasi kebijakan maka semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap Kecenderungan Para Peaksana

Sikap penerimaan dan penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang akan dijalankan bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal penuh tentang persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Akan tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak

mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang diinginkan.

5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, semakin sedikit kesalahan yang diasumsikan dan sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pertimbangan terakhir dalam evaluasi kinerja kebijakan publik adalah sejauh mana kontribusi lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik tidak ditentukan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang menguntungkan dapat menjadi masalah.

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah model yang akan digunakan penulis dalam menganalisis implementasi program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Menurut George C. Edward III terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan pencapaian implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementasi tahu yang akan dilakukan, arah capaian dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran yang kemudian dapat mengurangi distorsi kebijakan. Terdapat tiga aspek yang dapat dipakai dalam menentukan keberhasilan komunikasi sebagai berikut:

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan komunikasi yang baik pula. Dalam implementasi kebijakan sering terjadi miskomunikasi, hal tersebut sering terjadi

karena komunikasi telah melalui beberapa tahapan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsir ditengah jalan.

- 2) Kejelasan, komunikasi yang didapat dalam proses implementasi kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan dalam penyampaian kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tatanan tertentu, para pelaksana kebijakan membutuhkan fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan.
- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan haruslah konsisten dan jelas agar mudah untuk diterapkan serta dijalankan. Karena jika perintah yang dilakukan sering berubah-ubah, maka akan mengakibatkan kebingungan bagi pelaksanaan di lapangan.

b. Sumber daya

Meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas, akan tetapi apabila sumber daya yang dimiliki kurang, maka proses implementasi kebijakan yang akan dilakukan tidak dapat berjalan secara efektif. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia seperti adanya kompensasi implementor dan sumber daya finansial sebagai berikut:

- 1) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan yaitu staf. Gagalnya sebuah kebijakan sering kali terjadi karena kurangnya staf yang memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
- 2) Sumber Informasi, yaitu informasi yang relevan dan berkaitan dengan bagaimana implementasi kebijakan.
- 3) Wewenang, pada dasarnya wewenang harus mempunyai sifat formal agar perintah yang diberikan dapat dilaksanakan. Wewenang merupakan sebuah otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan secara politik.
- 4) Fasilitas, merupakan salah satu aspek penting yang mendukung keberhasilan dalam proses implementasi. Jika fasilitas seperti sarana

dan prasarana mendukung maka proses implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik.

c. Disposisi

Disposisi merupakan karakter yang dimiliki oleh seorang implementor seperti jiwa komitmen dalam tim, jujur dalam menjalankan tugas, dan mempunyai sifat demokratis. Jika seorang implementor mempunyai disposisi yang baik maka proses implementasi akan berjalan dengan baik, dan sebaliknya ketika seorang implementor mempunyai disposisi yang kurang baik maka proses dalam implementasi kebijakan akan berjalan tidak efektif. Menurut Edward III terdapat beberapa hal penting yang perlu dipahami dari Disposisi sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap akan menimbulkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, oleh karena itu memilih dan mengangkat personil pelaksanaan kebijakan haruslah orang yang mempunyai kemampuan dan kompetensi yang baik agar sistem pelayanan publik berjalan dengan optimal.
- 2) Insentif, cara yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah dengan melakukan manipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak berdasarkan kepentingan sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan merupakan sebuah tindakan pra pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Beberapa aspek dalam struktur organisasi yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP), dan fragmentasi. SOP merupakan sebuah kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggungjawab

kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Dimana jika struktur organisasi panjang maka akan mengakibatkan melemahnya pengawasan dan menimbulkan sistem birokrasi yang rumit dan kompleks yang mengakibatkan kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.3 Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik “Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik adalah seluruh aktivitas atau kegiatan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai warga negara. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misal kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Pelayanan publik harus bisa dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan demi mendapatkan kepercayaan publik kepada negara.

Membangun kepercayaan masyarakat atas apa yang dilakukan negara sebagai penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk.

Terdapat azas-azas dalam pelaksanaan pelayanan publik antar lain:

1. **Transparansi**, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi.
4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

2.4 Tinjauan Tentang Program *Smart Village*

2.4.1 Konsep *Smart Village*

Smart Village dirancang sebagai gagasan baru dalam mengembangkan potensi dan sumber daya desa. Konsep *smart village* tidak terpisah dari pengaruh pengembangan konsep *smart city*. Desa pintar mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat, pemerintah dan lainnya dalam membangun desa yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Konsep *smart village* pada dasarnya memanfaatkan potensi lokal desa, infrastruktur, sumber daya desa, dan peluang interaksi dengan wilayah kota. *Smart village* atau desa pintar disebut sebagai minimalis dari konsep *smart city* karena secara konsep dasar dan implementasi terdapat persamaan, tinggal disesuaikan dengan beberapa hal karena hanya berbeda cakupan wilayah. (Assani et al., 2020)

Menurut Wiswanadham (2010) menyatakan bahwa *smart village* adalah suatu layanan yang memanfaatkan teknologi informasi melaksanakan berbagai kegiatan desa yang dilaksanakan oleh masyarakat desa dengan efektif dan efisien. *Smart* kampung atau *smart village* adalah sebuah pengembangan konsep masyarakat desa yang ada dalam suatu kelompok yang mengatasi berbagai permasalahan wilayahnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang mereka miliki secara baik, bijak, dan efisien serta memperhatikan adat istiadat dan budaya setempat serta norma-norma yang berlaku (Baru et al., 2019).

Pengembangan konsep *smart village* bukan hanya berfokus pada kecanggihan teknologi pada suatu desa melainkan berkaitan dengan perubahan kondisi desa menjadi lebih baik dan sejahtera dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien serta berkelanjutan. Konsep *smart village* merupakan sesuatu yang sangat berkaitan dan tidak dapat terlepas dari konsep *smart city*. Pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yaitu berada pada wilayah desa, yang memerlukan adanya sebuah inovasi pembaharuan pada sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam mempercepat perkembangan wilayah desa. Harus ada konsep bangunan yang mendasari karakteristik kawasan desa dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desa dapat mencapai sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan dengan menghormati nilai, karakteristik, dan standar yang dimiliki oleh desa (Herdiana, 2019). Memiliki karakteristik wilayah desa, masyarakat yang homogen dan budaya yang sangat kental menjadi salah satu alasan perlu adanya pengembangan wilayah desa berbasis peningkatan teknologi informasi dan komunikasi.

2.4.2 Variabel *Smart Village*

Minimnya pengkajian mengenai konsep *smart village* jika dibandingkan dengan konsep *smart city*, menurut beberapa penelitian menyatakan bahwa dalam peningkatan konsep *smart village* dapat dilaksanakan dengan menggunakan variabel yang dikemukakan oleh Giffinger dengan pedoman master plan *smart city* yang dikeluarkan oleh kemenkominfo. Variabel *smart village* sangat erat kaitannya dengan karakteristik wilayah dan visi pengembangan dalam meningkatkan pembangunan dan pengelolaan desa. Kesesuaian pengembangan konsep *smart village* dengan kondisi pedesaan yaitu pemerintahan yang *smart*, masyarakat yang *smart* dan lingkungan yang *smart*. Sedangkan *smart mobility*, *smart transportation* dan *smart people* kurang sesuai jika diimplementasikan pada ketercapaian program *smart village* (Rachmawati, 2018).

Terdapa tiga variabel ketercapaian dalam konsep *smart village* sebagai sebuah dasar dalam pengimplementasian *smart village* yang sinergis antar ketiga variabel terkait (Herdiana, 2019). Tiga dimensi indikator dalam *smart village* sebagai berikut:

a. *Smart Government*

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah merupakan bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kasus ini pemerintah desa berada di posisi terendah pada struktur organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dan di dalamnya termasuk pelayanan publik kepada masyarakat serta pembangunan desa (Sulismadi, Wahyudi, & Muslimin, 2016). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam konsep *smart village* pada pemerintahan desa dapat memudahkan proses. *Smart Government* merupakan konsep atau langkah lanjutan dari *e-government* yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh

pemerintah untuk kinerja yang lebih baik. Tujuan implementasi *smart government* adalah sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Dilakukannya penataan manajemen serta proses kerja di lingkungan pemerintah dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui konsep pengembangan *e-government* yang berorientasi pada aktivitas pengolahan dan pengelolaan data serta informasi, sistem manajemen pekerjaan secara elektronik, dan pengaksesan layanan publik secara murah dan mudah oleh masyarakat luas.

b. *Smart Community*

Smart community merupakan sebuah komunitas di mana anggota dari pemerintah daerah, pembisnis, pendidikan, lembaga maupun masyarakat umum memahami potensi teknologi informasi, dan membentuk suatu komunitas sukses untuk bekerja sama dalam menggunakan teknologi dan mengubah komunitas mereka dengan cara positif dan signifikan. Industri. *Smart community* ditandai dengan tingginya penguasaan digital dan keterbukaan pemikiran dari anggota masyarakat, seperti tingkat fleksibilitas dari setiap individu dan keinginan untuk terus belajar dan berkembang dan partisipasi dalam kehidupan bersama.

c. *Smart Environment*

Pedesaan memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing yang sangat berkaitan dengan lingkungan pedesaan. Pada konsep *smart village* suatu lingkungan bukan hanya berorientasi pada lingkungan alam saja, namun mencakup seluruh elemen yang membentuk karakter desa yaitu tatanan sosial dan alam. Tatanan sosial pada lingkungan pedesaan terdiri dari nilai adat dan budaya, sedangkan pada tatanan alam terdiri dari pengelolaan dan pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan

(Herdiana, 2019). Berdasarkan pada kebutuhan desa untuk memiliki infrastruktur yang tepat, seperti jalan, jembatan, bangunan, saluran pipa, listrik dan sebagainya secara berkelanjutan. *Smart environment* berarti lingkungan cerdas di mana informasi dan layanan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, misalnya keterkaitan masyarakat dalam aktifitas lingkungan maupun dalam pengelolaan energy terbarukan dan penggunaan teknologi yang inovatif serta berdampak secara keberlanjutan.

Program *smart village* terdiri dari 5 kegiatan utama yaitu sebagai berikut:

a. Jejaring desa cerdas

Kegiatan ini berfokus pada inisiasi pengembangan pendekatan pemerintah yang terkoordinasi dan menyeluruh dalam bentuk jejaring desa cerdas dengan para pihak terkait secara nasional dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan teknologi digital menuju transformasi desa.

b. Duta digital

Pelaksanaan program *smart village* didukung oleh pendamping teknis seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang mempunyai kedudukan ditingkat desa. Dimana duta digital ini akan memberikan pendampingan dan pengawasan pada kader-kader digital desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa, meningkatkan literasi digital masyarakat desa serta memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

c. Peningkatan kapasitas

Peningkatan kapasitas ini memiliki tujuan dalam mewujudkan duta digital yang profesional dan mempunyai kemampuan teknis dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan layanan dasar serta mendorong peningkatan pembangunan dan pengembangan potensi desa yang kreatif serta inovatif.

d. Pengembangan ruang komunikasi digital

Ruang komunitas memiliki tujuan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, kolaborasi dan pengembangan inovasi serta pelayanan di desa. Ruang komunikasi digital ini merupakan sebuah ruang yang digunakan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.

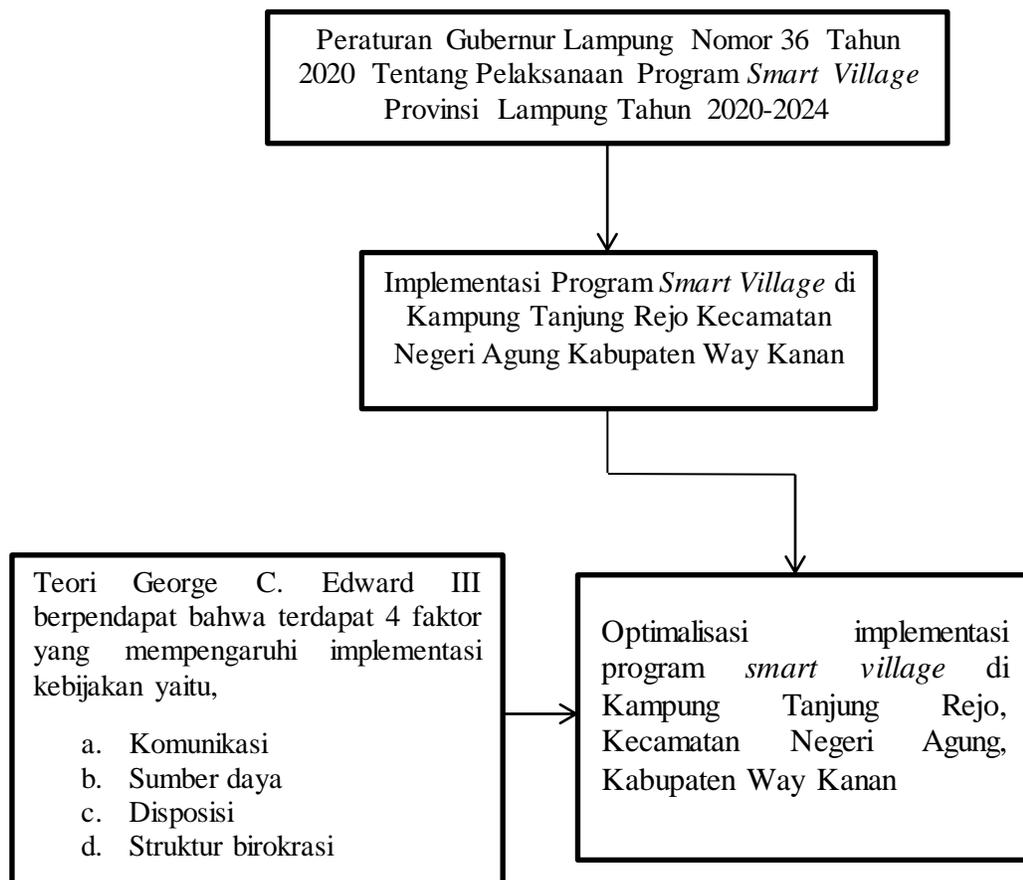
e. Monitoring dan Evaluasi

Setelah melakukan semua kegiatan tersebut, kemudian akan dilakukan monitoring dan evaluasi dalam melihat ketercapaian program *smart village*. Dimana melakukan penilaian apakah program berjalan dengan baik atau tidak, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian program *smart village*.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) kerangka berfikir adalah ringkasan yang mencerminkan hubungan antar variabel yang akan diteliti dan merupakan syarat untuk memecahkan masalah penelitian dan membentuk hipotesis penelitian dalam bentuk bagan yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif.

Adapun kerangka berpikir untuk mengetahui jalan penelitian yaitu sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber diolah oleh peneliti tahun 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada pemahaman mendalam, digunakan dalam meneliti pada situasi obyek yang alamiah, dimana seorang peneliti sebagai instrument inti, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Peneliti memilih tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah tipe penelitian yang cocok untuk digunakan dalam penelitian ini karena dengan tipe penelitian tersebut akan membuat peneliti menjadi lebih mudah memahami serta agar dapat menjabarkan dengan baik tentang apa yang telah dilakukan oleh aparat Kampung Tanjung Rejo sehingga akan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana implementasi program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo.

3.2 Fokus Penelitian

Permasalahan penelitian bertumpu pada suatu fokus penelitian. Fokus penelitian adalah batas masalah yang terdapat dalam penelitian kualitatif, dimana fokus penelitian berisikan mengenai permasalahan utama yang

sifatnya umum. Fokus penelitian dalam penelitian yaitu berfokus pada pelaksanaan program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan. Peneliti memberikan penjelasan pada maksud dan fokus penelitian dalam menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penelitian.

Pelaksanaan program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan ini akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III dalam melihat keberhasilan suatu program yang diimplementasikan terhadap beberapa faktor sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi yang baik dapat dilihat dari bagaimana transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian informasi mengenai pelaksanaan program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo. Komunikasi yang diberikan dalam penerapan program *smart village* kepada para pelaksana program sudah baik atau belum.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam pemenuhan keberhasilan implementasi program *smart village* dapat berwujud sumber daya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program.

c. Disposisi

Disposisi (tingkah laku pelaksana program), sikap dan komitmen dari implementor desa dalam menjalankan program *smart village* dapat dilihat dari pengangkatan birokrat (pelaksanaan) program dan insentif. Faktor ini berupaya mengidentifikasi seberapa serius sikap serta komitmen dari implementor dalam implementasi program *smart village*.

d. Struktur Birokrasi

Terstruktur atau tidaknya suatu birokrasi dapat diukur dari ketersediaan prosedur pengoperasian standar *Standard Operating Procedures* (SOP)

atau aturan yang berlaku dan fragmentasi dengan melihat pembagian tanggungjawab yang emban. Indikator ini berupaya dalam mengidentifikasi struktur birokrasi dalam menjalankan implemementasi program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat untuk melakukan sebuah penelitian. Cara yang tepat dalam menentukan tempat penelitian yaitu dengan memahami dan mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian, agar bisa melihat apakah terdapat kesesuaian antara kenyataan dilapangan menurut Moleong (2013:128). Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan yaitu bertempat di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dengan fokus peneliti dalam melakukan penelitian program *smart village* Kampung Tanjung Rejo. Alasan peneliti memilih lokasi Kampung Tanjung Rejo merupakan salah satu desa yang menerapkan Program *smart village*.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian yang diperoleh yaitu berupa hasil wawancara yang kemudian diproses dalam table triangulasi yang terlampir. Sumber data yang penting dalam sebuah penelitian yaitu tindakan dan kata-kata, selanjutnya merupakan data tambahan misalnya dokumen dan lain sebagainya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Metode penelitian yang digunakan dalam mendapatkan sebuah data primer yaitu dengan metode

observasi dan metode survey. Data primer dapat dikatakan sebuah opini subjek atau orang secara kelompok maupun individual, kegiatan atau sebuah kejadian nyata, hasil observasi mengenai sebuah benda dan hasil dari penelitian. Data primer yang akan diperoleh oleh peneliti berasal dari lapangan penelitian, melalui hasil observasi dan metode wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapat secara tidak langsung dimana data yang diperlukan dalam penelitian sebagai pelengkap informasi yang didapatkan dari sumber data primer. Data sekunder pada umumnya berupa sebuah dokumen tertulis dan data yang diperoleh dari berbagai media elektronik maupun cetak yang berkaitan dengan implementasi program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak bisa mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang sudah ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber, *setting* dan berbagai cara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga ketika peneliti ingin mengetahui berbagai hal dari informan yang lebih mendalam dengan jumlah informan yang sedikit atau kecil. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan

informasi terkait pelaksanaan program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan..

Berikut ini merupakan beberapa informan dalam wawancara yang akan peneliti wawancarai terkait dengan implementasi program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2. Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan |
|----|--------------------|---|
| 1. | Ketut Artike | Sekretaris DPMD Kabupaten Way Kanan |
| 2. | Sukirman | Kepala Kampung Tanjung Rejo |
| 3. | Angga Pangkuwinata | Kaur Keuangan Kampung Tanjung Rejo sekaligus penanggung jawab program <i>smart village</i> |
| 4. | Hendrik | Kasi Perencanaan Kampung Tanjung Rejo sekaligus penanggung jawab program <i>smart village</i> |
| 5. | Afifullah | Operator Kampung Tanjung Rejo |
| 6. | Sumbadi | Sekretaris Kampung Tanjung Rejo |
| 7. | Ari | Warga Kampung Tanjung Rejo |
| 8. | Siti | Warga Kampung Tanjung Rejo |

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2023

2. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data primer yang diperlukan dengan melakukan sebuah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Proses observasi dilakukan agar peneliti dapat melihat dan menilai secara langsung objek penelitian. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melihat dan mengamati langsung bagaimana jalannya program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan..

3. Dokumentasi

Selain metode observasi dan wawancara, penelitian kualitatif juga dapat menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan yang

terarah. Dimana apabila tersedia dokumen maka dapat memperluas pemahaman dan informasi untuk penelitian. Pada penelitian ini, data-data yang dapat dijadikan informasi yaitu data-data dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan Implementasi Program *Smart Village* di Kampung Tanjung Rejo yang dimiliki oleh Kampung Tanjung Rejo, berikut merupakan dokumen yang digunakan pada penelitian ini:

Tabel 3. Dokumentasi

| No | Dokumen | Substansi |
|----|--|---|
| 1. | Peraturan Gubernur Lampung No.36 Tahun 2020 | Pelaksanaan <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung 2020-2024 |
| 2. | SK Gubernur Lampung Nomor: G/71/V.12/HK/2021 | Penetapan Lokasi Sasaran Program <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung Tahun 2021 |
| 3. | Profil Kampung Tanjung Rejo | Gambaran Umum Kampung, Visi dan Misi Kampung |

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2023

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dan telaah pustaka dan juga analisis pernyataan dari hasil wawancara berdasarkan informasi dari informan atau narasumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dilokasi penelitian atau data lapangan yang digunakan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Dalam bentuk yang menajamkan, mengarahkan, menggolongkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi data dengan cara

sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan akhir, diverifikasi serta difokuskan pada data yang penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data sangat berguna karena dapat memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang sudah disusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data menggunakan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau sejenisnya dan penyajian data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teks naratif dan gambar yang sejenis.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hal yang digunakan dalam melakukan sebuah verifikasi secara terus menerus selama proses penelitian masih berjalan yaitu dapat dilakukan sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil inti dari serangkaian kategori hasil penelitian sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Moleong (2016), menyatakan bahwa keabsahan data merupakan standar validitas data yang diperoleh. Kriteria validitas data adalah sebagai berikut:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Derajat kepercayaan (*Credibility*) digunakan dalam menunjukkan kredibilitas atau kepercayaan mengenai hasil penelitian yang dilaksanakan bahwa apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi mempunyai persamaan. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti agar hasil dari penelitian yang dilakukan dapat dipercaya adalah dengan cara triangulasi. Terdapat 3 macam triangulasi dalam menentukan keabsahan data yaitu: (1) Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. (2) Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek sebuah data terhadap sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara kemudian dicek kembali dengan observasi dan dokumentasi. (3) Triangulasi waktu yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan salah satu saja dari ketiga macam triangulasi yaitu menggunakan triangulasi sumber. Peneliti melakukan pengecekan dengan menggunakan cara triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Teknik yang sama artinya mengajukan pertanyaan yang sama dalam melakukan wawancara terkait dengan implementasi program *smart village* kepada para informan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah peneliti buat.

2. *Transferability*

Transferability merupakan pemeriksaan keteralihan data dalam penelitian yang dilakukan dengan uraian rinci dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks dimana lokasi penelitian.

3. *Dependability*

Dependability adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan melakukan audit pada seluruh proses penelitian. Hasil dari penelitian yang dilakukan akan dinyatakan tidak dependable apabila data penelitian ada namun proses penelitian tidak ada atau tidak dilakukan.

4. *Confirmability*

Confirmability atau sering disebut sebagai objektivitas penelitian. Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian sudah disetujui oleh banyak orang. Uji *Confirmability* sama dengan uji *dependability*, sehingga penggunaannya dapat dilaksanakan secara bersamaan. Pengujian terhadap *confirmability* dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung agar setiap hasil penelitian adalah sebuah keluaran dari proses.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang implementasi program *smart village* di Kampung Tanjung Rejo berdasarkan faktor keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III maka diperoleh kesimpulan bahwa; pertama yaitu faktor komunikasi dimana komunikasi mengenai program dalam aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi sudah dikomunikasikan dengan jelas melalui sosialisasi dan bimbingan teknis. Kedua, yaitu sumberdaya, jika dilihat dari aspek wewenang dan informasi sudah baik namun dilihat dari aspek sumber daya manusia belum maksimal karena ada beberapa aparat yang belum memahami dan mengerti bagaimana pelaksanaan program *smart village* serta fasilitas pendukung yang belum memadai karena keterbatasan anggaran dana yang diperoleh. Ketiga, yaitu disposisi dengan aspek pengangkatan birokrat sudah dilakukan penjangkangan untuk beberapa posisi di pemerintahan kampung, serta bagian insentif hanya didapatkan pada awal Kampung Tanjung Rejo ditetapkan sebagai lokus sasaran program *smart village*. Keempat, struktur birokrasi, dimana aspek SOP belum ada dan masih dalam proses perencanaan dan fragmentasi telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat kampung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlu adanya sosialisasi dan rapat rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada aparat Kampung agar implementasi program tidak terpusat pada *smart government* atau pemerintah yang cerdas dalam memberikan pelayanan berbasis digital.
- b. Dalam upaya meningkatkan implementasi program diperlukan adanya bimbingan teknis dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bagi pelaksana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan optimal.
- c. Perlu adanya *Standar Operating Procedure* (SOP) khusus untuk pelaksanaan program *smart village* agar lebih efektif dalam pelaksanaan dan pembagian tupoksi, sehingga tidak ada tumpang tindih tugas dalam implementasi program.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Assani, S., Rosyadi, A. W., Mukhtar, A. A., & ... (2020). *E-Commerce Desa Dalam Upaya Menuju Smart Village; Studi Analisa Dan Perancangan*. *Jurnal IKRAITH Informatika*, 4(3), 31–40.
- Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). Tahap Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoeearth*, 4(2), 68.
- Hadian, N., & Susanto, T. D. (2022). Pengembangan model smart village Indonesia: Systematic literature review. *Journal of Information System, Graphics, Hospitality and Technology*, 4(2), 77-85.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 21(1), 1-16.
- Hermayanti, E. S., & Yuwono, T. (2020). Implementasi Green Smart Village di Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 121-130.
- Kahfi, A., & Sarjan, M. (2020). Implementasi Peta Digital untuk Smart Village (Studi Kasus Desa Tammangalle, Polewali Mandar). *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar*, 6(1), 13-18.

- Karneli, O., Ruzikna, R., Kasmirudin, K., & Andini, F. K. (2019, September). Sosialisasi dan implementasi program smart village di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, pp. 139-143).
- Maulana, S. (2022). Sinergitas Pelaksanaan Program Smart Village di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Administrativa*, 4 Nomor 1(1), 111
- Moleong, L. J. M. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Nanda, S. L. (2023). Implementasi Program Smart Village Di Provinsi Lampung (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
- Nisa, C., Wulandjani, H., Riskarini, D., & Situmorang, N. M. (2021). Memaksimalkan Program Smart Village Melalui Implementasi Pemasaran Digital bagi Warga Desa Kemuning. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 2(2), 137-144.
- Nurjayadi, N., Torkis, N., Herwin, H., & Khusaeri, A. (2020). Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat Melalui Implementasi Smart Village Pada Desa Rimba Makmur. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 140-151.
- Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung 2020-2024.
- Saidah, N., Khasanah, L., Asriyatu Zahra, & Ridloah, S. (2022). Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program Smart
- Siti, K. (2023). Implementasi Smart Village Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Pekon Trimulyo, Kec. Gedung Surian, Kab. Lampung Barat).
- Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). Penerapan model smart village dalam pengembangan desa wisata: Studi pada desa wisata boon pring sanankerto

turen kabupaten malang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 18-28.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. (Jakarta: Alfabeta, 2013)

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/71/V.12/HK/2021 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2021.

Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu